

Analisis Terhadap Pemikiran Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan Ali Syariati Dalam Konteks Islam Kontemporer

Muhammad Rizki Madani

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. Lap. Golf, Pancur Batu, Sumatera Utara 20353

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 25, 2025

Revised January 30, 2025

Accepted February 15, 2025

Available online February 22, 2025

Kata Kunci:

Pemikiran Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Ali Syariati

Keywords:

Thoughts of Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Ali Shariati



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pandangan ulama kontemporer mengenai etika politik Islam, dengan fokus pada pemikiran Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan Ali Syariati. Latar belakang masalah mencakup tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip etika politik dalam konteks masyarakat modern. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif untuk menganalisis karya-karya dan pemikiran ketiga tokoh tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami kontribusi pemikiran mereka terhadap penguatan etika politik Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan Ali Syariati menekankan pentingnya nilai-nilai Islam sebagai dasar etika politik yang adil dan transparan. Ketiganya, meskipun berbeda pendekatan, sepakat bahwa syariat Islam harus menjadi panduan utama dalam menciptakan tatanan sosial dan politik yang berkeadilan.

ABSTRACT

This study discusses the views of contemporary scholars on Islamic political ethics, focusing on the thoughts of Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, and Ali Shariati. The background of the problem includes the challenges faced in implementing the principles of political ethics in the

context of modern society. The method used is a qualitative literature study to analyze the works and thoughts of the three figures. The purpose of this study is to identify and understand the contribution of their thoughts to strengthening Islamic political ethics. The results of this study indicate that the thoughts of Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, and Ali Shariati emphasize the importance of Islamic values as the basis for fair and transparent political ethics. All three, despite their different approaches, agree that Islamic law must be the main guide in creating a just social and political order.

PENDAHULUAN

Pemikiran politik Islam telah menjadi salah satu topik sentral dalam kajian keislaman modern, khususnya dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan ekonomi dunia kontemporer. Dalam perjalanan sejarah, ulama kontemporer seperti Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan Ali Syariati memainkan peran penting dalam membentuk pandangan umat Islam mengenai etika politik yang relevan dengan dinamika modernitas.

Pemikiran mereka tidak hanya merespons realitas zamannya, tetapi juga menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Islam untuk membangun tatanan sosial dan politik yang adil, transparan, dan akuntabel. Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, memberikan landasan awal bagi gerakan sosial-politik Islam yang bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan bernegara. Sejak didirikan pada tahun 1928 di Ismailiah, Ikhwanul Muslimin berkembang menjadi salah satu kekuatan penting dalam sejarah politik Mesir dan dunia Arab.

Al-Banna memandang bahwa keadilan sosial dan penerapan syariat merupakan tanggung jawab negara dalam menjaga kesejahteraan umat. Pemikiran Al-Banna menekankan pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam sebagai jawaban atas tantangan penjajahan dan modernitas yang melanda Mesir. Sementara itu, Sayyid Qutb mengembangkan pemikiran lebih lanjut mengenai konsep hakimiyah atau kedaulatan Tuhan, yang menurutnya menjadi inti dari politik Islam.

Dalam karyanya seperti *Fi Zilal Al-Qur'an* dan *Ma'alim Fi Al-Tariq*, Qutb menyatakan bahwa hanya hukum Allah yang memiliki legitimasi penuh dalam mengatur kehidupan manusia. Ia mengkritik keras sistem sekuler yang dianggapnya sebagai "jahiliyah modern," dan menyerukan penerapan hukum Islam secara menyeluruh untuk mengatasi problematika sosial dan politik. Namun, pandangan radikal ini juga

*Corresponding author

E-mail addresses: muhammadrizkimadani@gmail.com

memunculkan kontroversi, terutama dalam penerapannya oleh kelompok-kelompok Islam tertentu yang menjadikan ide-ide Qutb sebagai legitimasi untuk tindakan ekstrem.

Di sisi lain, Ali Syariati, seorang pemikir revolusioner asal Iran, menghubungkan nilai-nilai Islam dengan modernitas dan pembebasan sosial. Ia menawarkan pendekatan baru dengan menempatkan Islam sebagai ideologi progresif yang relevan dalam melawan penindasan sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu konsep inti pemikirannya adalah "Tauhid," yang ia jadikan simbol persatuan, kesetaraan, dan perlawanan terhadap tirani.

Syariati juga mengkritik ulama tradisional yang dianggap tidak relevan dengan persoalan sosial-politik kontemporer, serta menciptakan dikotomi antara "Islam Progresif" yang dinamis dan "Islam Klerikal" yang kaku. Ketiga tokoh ini, meskipun berasal dari konteks dan latar belakang yang berbeda, memiliki kesamaan dalam menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama untuk membangun tatanan politik yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan Ali Syariati mengenai kekuasaan dan peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menganalisis kontribusi pemikiran mereka terhadap penguatan etika politik Islam dalam masyarakat modern. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dapat diintegrasikan dalam praktik politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur kualitatif dengan pendekatan analisis tekstual dan konseptual terhadap karya-karya Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan Ali Syariati. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kontribusi pemikiran mereka terhadap penguatan etika politik Islam. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang mengkaji pemikiran mereka dalam konteks politik Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi literatur yang relevan, menyeleksi karya-karya yang membahas etika politik Islam secara langsung, serta mendokumentasikan dan menganalisis gagasan utama yang ditemukan. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi deskripsi konsep dengan menguraikan pandangan masing-masing tokoh, interpretasi untuk memahami makna dan relevansi pemikiran mereka, perbandingan untuk melihat kesamaan serta perbedaan pemikiran mereka, dan sintesis guna merumuskan kontribusi pemikiran mereka terhadap penguatan etika politik Islam.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan Ali Syariati dalam membangun konsep etika politik Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Hasan Al-Banna

Sejak berdirinya Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna tahun 1928, Peta politik di Mesir memasuki suatu fase baru. Kebijakan yang diterapkan oleh para pemimpin yang berkuasa di Mesir mengalami perubahan serta dinamika yang signifikan, yang berkaitan dengan interaksinya dengan Ikhwanul Muslimin. Interaksi antara Ikhwanul Muslimin dan pemerintah Mesir dapat dipetakan dalam dua periode, yaitu periode pra-revolusi dan pasca-revolusi.

Pertama, periode pra-revolusi. Pergulatan Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah Mesir sering diwarnai adanya konspirasi, penindasan, yang kemudian disambut dengan demonstrasi dan persaingan merebut kekuasaan. Kekuatan mereka yang mengakar, sangat ditakuti pemerintahan Ahmad Mahir Pasha, Oleh karena itu, terdapat upaya untuk menghalangi Ikhwanul Muslimin dalam persaingan pemilu melalui pemalsuan hasil pemilu, penghalangan terhadap para calon, serta penangkapan terhadap para aktivis Ikhwanul Muslimin. Selanjutnya, pada periode pasca-revolusi, terdapat tiga pemerintahan di Mesir yang melibatkan Ikhwanul Muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui interaksi yang bersifat konfrontatif-radikal maupun moderat.¹

Menurut perspektif Hasan Al-Banna, unsur paling mendasar kekuasaan dalam Islam adalah kaidah sosial, yang terkait dengan etika, nilai-nilai, norma, dan kehidupan sosial lainnya yang memastikan keberlangsungan interaksi di suatu wilayah. Dengan demikian, kekuasaan harus digunakan untuk

¹Alsar Andri, Askarmin Harun, *Kekuasaan Dalam Pandangan Negara Konvensional dan Negara, Jurnal Dialektika*, Vol 4 No. 1, (2019). hal. 42

kepentingan bersama. Hasan Al-Banna, seperti yang disebutkan dalam hadist Rasul, mengakui bahwa pemimpin adalah sumber kekuasaan.

Dengan merujuk kepada Rasulullah Saw yang menjadikan pemerintahan sebagai salah satu aspek yang melekat dalam ikatan Islam, dapat disimpulkan bahwa Islam mencakup aspek hukum dan pengalaman yang seharusnya diakui sebagai pedoman yang terintegrasi, baik dalam bentuk undang-undang maupun ajaran, serta dalam bentuk peraturan dan keputusan. Hal ini menegaskan bahwa tidak seharusnya ada pemisahan antara aspek-aspek tersebut. Bagi Al Banna, isu pemerintahan ini merupakan hal yang sangat krusial dan penting.²

Kekuasaan seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan bersama, tetapi kita tahu betapa buruknya menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau partai. Sangat jelas bahwa ini melanggar prinsip dan semangat awal kekuasaan, dan banyak ahli berpendapat bahwa ini adalah penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Ikhwanul Muslimin, kekuatan diperlukan untuk melawan kejahatan yang tidak dapat dicegah oleh Al-Quran dan Al-hadist. Oleh karena itu, kekuatan diperlukan untuk mencegah perbuatan jahat. Pemerintahan adalah salah satu pilar bangunan Ikhwan. Ia harus digunakan dalam kehidupan nyata untuk berfungsi sebagai nasehat dan alat pengarah. Dahulu, khalifah yang ketiga (Utsman bin Affan) berkata, "Sesungguhnya, Allah mencegah dengan kekuasaan sesuatu yang tidak bisa dicegah dengan Al-Qur'an".

Secara umum, pemikiran IM dibangun berdasarkan premis dasar bahwa Islam merupakan agama yang menyeluruh (syumul), yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Ajaran-ajaran Islam tidak sebatas berkaitan dengan ibadah ritual dan urusan-urusan pribadi semata, melainkan juga berhubungan dengan kehidupan publik umat Islam. Dalam sebuah makalah yang dimuat di surat kabar Ikhwan, Al-Banna menegaskan bahwa keislaman seorang Muslim tidak dapat dianggap sempurna jika ia mengabaikan kondisi umat yang sedang mengalami permasalahan, dengan hanya sibuk terfokus pada ibadah. Dalam risalah lainnya, Al-Banna menyatakan bahwa salah satu syarat kesempurnaan keislaman seseorang adalah keterlibatannya dalam aktivitas politik.³

Pemerintahan (kekuasaan) bagi Al-Ikhwanul Muslimin dipahami sebagai suatu fikrah Islam yang sah. Pada dasarnya, kekuasaan bukanlah tujuan yang diprioritaskan. Sebaliknya, yang diharapkan oleh umat Muslim adalah penerapan syariat Allah melalui pemerintahan serta penegakan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip masyarakat Islam yang utama, dengan menekankan pada keadilan dan penyebaran nilai-nilai kebenaran, kebebasan, serta keutamaan. Para pemikir Ikhwan Al-Muslimin sepakat bahwa sumber kekuasaan adalah tunggal, yaitu kehendak rakyat, yang tercermin dalam kerelaan dan pilihan mereka secara bebas dan sukarela. Dengan demikian, Ikhwan Al-Muslimin meyakini bahwa rakyat merupakan sumber kekuasaan.

Pemikiran Sayyid Qutb

Seorang pemikir, penulis, dan cendekiawan Islam Mesir bernama Sayyid Qutb memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gerakan Islam politik pada abad ke-20. Teori-teorinya membahas berbagai masalah yang sering menimbulkan kontroversi, seperti politik, keadilan sosial, dan kebebasan individu. Dalam pemikiran Qutb, radikalisme berkaitan dengan pemikirannya tentang Hakimiyyat Allah, atau kekuasaan Tuhan, yang menurutnya hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan absolut dan bahwa pemerintahan manusia harus didasarkan pada ajaran Islam.⁴

Sayyid Qutub berpendapat bahwa sistem politik merupakan suatu konsep yang terkait dengan pengelolaan pemerintahan. Dalam pandangannya, sistem politik menjelaskan fungsi-fungsi pemerintahan, merinci kewajiban dan hak-hak yang ada, serta melakukan pengawasan terhadap penguasa untuk mewujudkan hukum Islam yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak. Beliau menekankan bahwa Islam adalah agama yang universal dan mencakup segala aspek kehidupan. Seorang Muslim dinilai belum sempurna dalam menjalankan ajaran agamanya jika ia tidak berperan dalam politik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang politikus yang ulung, yang mampu menyatukan berbagai elemen di Madinah dalam wadah Negara Madinah, melalui pembentukan piagam Madinah yang dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat.

Sayyid Qutub menyatakan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, tidak hanya mengatur tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga menyediakan petunjuk mengenai cara mengatur seluruh

²M. Iqbal Hasanuddin, *Studi Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Negara Islam, Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol 9 No. 1, (2019). hal. 162

³Otoman, *PEMIKIRAN POLITIK HASAN AL-BANNA (1906-1949) DAN PEMBENTUKAN RADIKALISME ISLAM*, *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol XV No. 1, (2015). hal. 49

⁴Azwar Sani, *Radikalisme dan Ekstremisme dalam Pemikiran Sayyid Qutb: Tinjauan Kritis atas Tafsir Fi-Zilalil Qur'an, Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir*, Vol 4 No. 2, (2023). hal. 46.

aspek kehidupan, termasuk aspek politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, untuk mencapai kejayaan dan kemakmuran, umat Islam hendaknya kembali kepada ajaran Islam yang sejati.

Memiliki perspektif yang luas mengenai permasalahan umat, serta memperhatikan berbagai urusan di dunia, menunjukkan kesediaan untuk turut serta dalam mencari solusi demi kepentingan bersama umat. Dalam konteks ini, tidak terdapat kebaikan dalam Agama Islam yang terpisah dari aspek politik, dan demikian pula tidak ada kebaikan dalam politik yang tidak terkait dengan agama. Islam hadir dengan membawa ajaran-ajaran politik yang bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada umat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan adanya sistem politik yang diatur oleh umat, mereka akan dapat meraih kebahagiaan dalam lingkungan mereka sendiri.

Qutb mengembangkan konsep Takfir dari gagasan-gagasan ini. Takfir adalah proses mengatakan bahwa seseorang atau kelompok orang Islam telah menjadi kafir, atau murtad, karena mereka tidak menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang benar. Dalam pemikirannya, Qutb mendukung penggunaan kekerasan untuk menggulingkan sistem yang dia anggap tidak Islami dan membangun masyarakat Islam berdasarkan nilai-nilai Islam yang benar.⁵

Berbagai kelompok Islamis radikal dan organisasi jihadis telah mendapatkan inspirasi dari ide-ide ini. Sayyid Qutb telah disebut oleh beberapa kelompok teroris, seperti Al-Qaeda, sebagai intelektual yang mempengaruhi pendapat dan tindakan mereka. Meskipun banyak orang tidak setuju dengan interpretasi radikal Qutb, pemikirannya masih dibahas dan diperdebatkan di dunia Islam.

Secara keseluruhan, ide-ide Sayyid Qutb mencakup berbagai masalah yang sangat radikal dan ekstrem, dan memengaruhi banyak pemikir dan aktivis Muslim di seluruh dunia. Pandangan ini, bagaimanapun, tidak mencerminkan keyakinan mayoritas umat Islam, yang lebih moderat dan menolak penggunaan kekerasan atas nama agama. Namun, pandangan ini tidak mencerminkan pandangan mayoritas umat Islam, yang lebih moderat dan tidak setuju dengan penggunaan kekerasan atas nama agama.

Faktor-faktor yang membentuk pandangan radikal Sayyid Qutb dapat dikaitkan dengan situasi politik, sosial, dan ekonomi saat itu, serta berbagai aspek kehidupan pribadinya. Sayyid Qutb belajar dan mengajar di Amerika Serikat selama dua tahun (1948-1950). Selama periode ini, ia melihat dengan kritis budaya Barat dan terkejut oleh nilai-nilai materialistis dan konsumerisme yang merasukinya.⁶

Pengalaman ini memengaruhi pikiran dan pemikirannya tentang "jahiliyyah" Barat dan kebutuhan untuk memerangnya dengan Islam. Qutb kembali ke Mesir pada awal 1950-an, di tengah pergolakan politik negara itu. Pemerintahannya, yang dipimpin oleh kolonial Inggris, dianggap tidak bermoral dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rakyat Mesir.

Qutb menyatakan bahwa sistem saat ini tidak memberikan keadilan sosial, ekonomi, dan politik yang dibutuhkan, dan dia menemukan solusi dalam ajaran Islam.

Setelah kembali ke Mesir, Qutb bergabung dengan Gerakan Ikhwanul Muslimin. Ia sangat terpengaruh oleh pemikiran Hasan alBanna, pendiri gerakan tersebut, yang mendorong solusi Islam untuk masalah politik, sosial, dan ekonomi bangsa. Keterlibatannya dalam gerakan tersebut menciptakan pandangan radikal tentang peran Islam dalam masyarakat dan pemerintahan.

Banyak negara Timur Tengah, termasuk Mesir, mencoba eksperimen politik dengan sosialisme dan nasionalisme Arab pada pertengahan abad ke-20. Banyak orang di daerah tersebut kecewa karena konflik dan ketidakstabilan yang terjadi, serta gagalnya berbagai pengalaman dalam menerapkan ideologi ini. Qutb melihat kegagalan ini sebagai bukti keyakinannya bahwa hanya sistem politik yang didasarkan pada ajaran Islam yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat Muslim.

Oleh karena itu, banyak faktor bekerja sama untuk membentuk pandangan ekstrem dan radikal Sayyid Qutb. Pengalaman pribadinya, latar belakang budayanya, keadaan politik dan sosial, dan pengaruh tokoh-tokoh penting dari dunia Islam adalah semua faktor yang membentuk pemikirannya, yang kemudian menjadi inspirasi bagi gerakan Islam radikal di seluruh dunia.

Kewajiban menegakkan hukum Allah berdasarkan konsep *ḥākimiyyah* adalah salah satu isu yang diangkat oleh beberapa kelompok aktivis Islam, dan mereka memperjuangkannya dengan berbagai cara, termasuk kekerasan. Dalam pemikiran dan gerakan Islam, istilah "*ḥākimiyyah*" baru-baru ini dikenal. Sayyid Qutb menggunakan istilah ini dalam bukunya *Ma'ālim fī aṭ-Ṭarīq* dan tafsir *Fī Zīlāl alQur'ān*, tetapi Abu al-A'la dan al-Maududi adalah yang pertama kali menggunakannya dalam sejarah pemikiran Islam.

Pemikir Islam, khususnya setelah gerakan kemerdekaan di seluruh dunia Islam, menggunakan istilah ini semakin banyak, menimbulkan pertanyaan tentang rujukan penetapan hukum dalam kehidupan bernegara. Kata *al-ḥukm*, yang berasal dari kata *ḥā-kāf-mīm*, adalah akar dari kata *al-ḥākimiyyah*. Kata ini

⁵Moh. Muhyan Nafis dan Delta Yaumin Nahri, *KONSEP TAKFİR SAYYID QUTB DALAM SURAH ALMĀ'IDAH (Analisis Maqāṣid Al-Qur'ān Perspektif Ahmad al-Raysūnī)*, *AT-TIBYAN: Journal Of Qur'an and Hadis Studies*, Vol 6 No. 1 (2023), hal.26

⁶Saifir Umam, *Sayyid Qutb: Pemikiran dan Pengaruhnya terhadap Gerakan-Gerakan Islam Radikal di Mesir, Tsaqafah*, Vol 2 No. 2, (2004), hal. 63

memiliki arti dasar al-man'u, yang berarti menolak dan menahan. Kekang hewan disebut "ḥakamah" karena menahannya sehingga tidak berontak atau lepas. Putusan pengadilan disebut al-ḥukm dan pemerintah disebut ḥukūmah karena keduanya menahan dan menolak kezaliman.

Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, "Dan Kami berikan kepadanya al-Hukm selagi ia masih kanak-kanak," dalam perang melawan kebodohan, kata al-Hukm, juga disebut sebagai al-Hikmah. Semua hukum Islam yang berlaku bagi semua mukalaf berasal dari Allah semata-mata, dan istilah "ḥakimiyyah" identik dengan hukum, sehingga yang dimaksud adalah "mengesakan" (tauhid) Allah dengan menerapkan hukum dan menyerahkan semua hukum hanya kepada-Nya.

Pengertian di atas tidak memiliki kesalahan. Menurut pakar hukum Islam al-Amidiy, "Ketahuilah bahwa tidak ada penetap hukum selain Allah Swt., dan tidak ada ketetapan hukum kecuali apa yang ditetapkan-Nya. Persoalan muncul ketika diberi makna dan tujuan yang salah." Meskipun kata itu sendiri benar, artinya salah. Meskipun kata itu sendiri benar, artinya salah. Atau, seperti yang dikatakan Imam Ali kepada kaum Khawarij ketika mereka mengatakan, "lā ḥukmā illā lillāh", "itu kalimat yang benar (ḥaq) tetapi yang dimaksud keliru (bāṭil)".

Mereka menganggapnya kafir, menurut komentar Imam Nawawi, "Kalimat ini pada mulanya benar, sebab Allah berfirman: ini al-ḥukmu illā lillāh, tetapi yang dimaksud oleh mereka adalah menolak keputusan politik Imam Ali yang memilih jalan taḥkīm (arbitrase) dalam perseteruannya dengan Muawiyah". Menurut Qutb, Jahiliyah merupakan ancaman terbesar yang bertentangan dengan konsep tauhid uluhiyyah dan merongrong kekuasaan Allah di muka bumi. Konsep jahiliyah berlandaskan pada kedaulatan manusia, yang mana satu sama lain saling mempertuhankan dalam bentuk pengakuan terhadap hak untuk menetapkan nilai, hukum, undang-undang, serta sistem yang jauh dari manhaj yang ditetapkan oleh Allah.

Qutb menyatakan, "Kewenangan untuk menetapkan hukum adalah prerogatif yang hanya dimiliki oleh Allah, berlandaskan pada sifat uluhiyyah-Nya. Ḥakimiyyah merupakan salah satu sifat yang khas dari uluhiyyah-Nya. Apabila ada seseorang yang mengklaim memiliki hak tersebut, maka ia telah menyaingi Allah dalam salah satu sifat-Nya yang paling khusus. Barangsiapa melakukan hal tersebut, maka ia telah terjatuh ke dalam kekafiran yang nyata."⁷ Sayyid Qutb dan konsep Hakimiyyah dalam radikalisme pemikiran politiknya menunjukkan bahwa Qutb menganggap kedaulatan sepenuhnya milik Allah, yang menjadikannya menolak sistem sekuler.

Ia berargumen bahwa negara yang tidak mengakui hukum ilahi akan membawa kerusakan moral dan sosial. Dalam pandangannya, penerapan syariah adalah keharusan, dan jihad dianggap sebagai perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Dengan demikian, pemikiran Qutb bukan hanya kritik terhadap negara sekuler, tetapi juga menyerukan mobilisasi umat Muslim untuk kembali kepada prinsip-prinsip Islam, yang telah menjadi inspirasi bagi banyak gerakan radikal di dunia Islam.

Pemikiran Ali Syariati

Pemikiran Politik Ali Syariati

Ali Shariati merupakan seorang pemikir revolusioner yang memiliki pengaruh besar terhadap gerakan intelektual di Iran menjelang Revolusi 1979. Pemikiran politik Shariati berakar pada konsep Islam yang progresif dan dinamis. Baginya, Islam bukan hanya agama yang mengatur ritual, tetapi juga sebuah ideologi yang mampu menjadi alat pembebasan dari penindasan. Salah satu konsep kunci dari pemikirannya adalah "Tauhid" sebagai prinsip kesatuan, kesetaraan, dan perlawanan terhadap segala bentuk tirani, baik politik maupun sosial.⁸

Pemikiran Shariati tentang revolusi dipengaruhi oleh konsep martir dalam Islam, di mana ia mengangkat tokoh-tokoh sejarah seperti Imam Hussein sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Melalui narasi ini, Shariati berusaha memobilisasi massa untuk melawan rezim Shah yang dianggapnya korup dan represif. Konsep-konsep seperti istishad (pengorbanan) dan mustad'afin (yang tertindas) menjadi pusat dari gagasan Shariati tentang perjuangan.⁹

Peran Ali Shariati dalam Revolusi Iran sangat signifikan. Melalui tulisan-tulisannya dan ceramah-ceramah yang disampaikan di universitas-universitas Iran, Shariati berhasil menarik perhatian banyak kalangan muda dan intelektual. Ia menawarkan perspektif Islam yang berbeda dari pandangan ulama tradisional, yang lebih berfokus pada isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. Shariati menekankan bahwa Islam adalah agama yang harus berperan aktif dalam memerangi ketidakadilan sosial dan ekonomi.

⁷Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 1996), hal. 1990

⁸Siti Syamsiyatul Ummah, *Teologi Pembebasan Ali Syari'ati (Kajian Humanisme dalam Islam)*, *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, Vol 2 No.2, (2020). hal. 181

⁹Afifah, N., Lestari, J. T., & Annarawati, R, *Pemikiran/Pembaharuan Islam Iran: Ali Syariati*. *TABYIN: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*, Vol 4 No. 01, (2022). hal. 58.

Kritik Ali Shariati terhadap Ulama Tradisional

Salah satu kontribusi utama Ali Shariati dalam perkembangan pemikiran Islam di Iran adalah kritiknya yang tajam terhadap ulama tradisional. Shariati menilai bahwa ulama tradisional telah kehilangan relevansi dalam menghadapi perubahan sosial dan politik modern. Ia mengkritik mereka karena terlalu fokus pada aspek ritualistik agama, mengabaikan aspek-aspek sosial dan politik yang lebih luas. Baginya, ulama tradisional gagal memanfaatkan potensi Islam sebagai kekuatan yang membebaskan dan dinamis.

Shariati menciptakan dikotomi antara "Islam Klerikal" dan "Islam Progresif." "Islam Klerikal" yang diwakili oleh ulama tradisional dianggapnya tidak peka terhadap persoalan sosial dan hanya memfokuskan diri pada aturan-aturan hukum agama yang kaku. Sementara "Islam Progresif" yang ia usung adalah Islam yang relevan dengan persoalan kontemporer dan berperan aktif dalam memerangi ketidakadilan.

Shariati juga mengkritik ulama tradisional karena sering berafiliasi dengan kekuasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurutnya, kedekatan ulama dengan kekuasaan politik mengakibatkan mereka tidak lagi berperan sebagai pengkritik sosial yang independen, melainkan sebagai pendukung status quo. Kritik ini memicu ketegangan antara Shariati dan beberapa ulama, tetapi juga mendapatkan dukungan dari kalangan muda yang merasa bahwa Islam harus tampil sebagai agama yang revolusioner dan progresif.¹⁰

Islam dari pemikiran Ali Syariati secara utuh adalah bentuk Islam sosialis. Pemikirannya meyakini bahwa di bawah kepemimpinan pemerintahan Islam yang bersifat sosialis dan telah direstrukturisasi, kemungkinan akumulasi modal yang tak terbatas dapat dicegah. Untuk mencapai tujuan ini, ia mendukung agar masyarakat Islam dengan tegas mengadopsi program-program progresif. Dalam visinya, langkah-langkah ini diharapkan akan menciptakan kerangka kerja yang lebih adil dan berkeadilan, serta mencegah terjadinya akumulasi kekayaan yang tidak seimbang di tangan segelintir individu.

Dalam kapasitasnya sebagai pemikir, Syari'ati menunjukkan kepekaan terhadap paradoks. Dia adalah pemikir bebas yang selalu mencari kebenaran dalam hidupnya melalui mistik, pemahaman intuitif tentang dunia, dan peran Tuhan di mana pun. Dia juga tampil di depan umum untuk mendukung keadilan sosial dan kebebasan dari ketertindasan melalui revolusi kolektif.

Dia berpendapat bahwa agama harus diubah dari ajaran moral pribadi menjadi program revolusioner untuk mengubah dunia. Dia menyerupai Ayatullah Ruhullah Al-Musawi Khomeini (1902-1089) dalam hal ini, yang secara konsisten menentang gagasan bahwa Islam hanyalah masalah hukum dan ritual yang mengatur hal-hal teknis seperti wudhu, menstruasi, kelahiran, makanan, dan sebagainya.¹¹

Syari'ati menanggapi ketidakadilan dengan sangat keras; dia melihatnya sebagai gejala penyakit dan, yang lebih penting, sebagai konsekuensi penting dari kegagalan emansipasi manusia. Dia menghabiskan hidupnya untuk melawan ketidaksetaraan. Sebagai pengikut Imam Ali ibn Thalib dan Husain, Syi'ah tidak dapat menyetujui ketidakadilan. Para penguasa telah menghilangkan iman, seringkali dengan menggunakan nama Syi'ah sendiri.

Ali Syari'ati juga memiliki ideologi yang kuat tentang pentingnya pemimpin masyarakat yang baik. Menurutnya, seseorang yang dapat menjadi seorang pemimpin (khalifah) adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sifat-sifat agung Tuhan dalam dirinya, serta kemampuan untuk terus berubah. Seseorang harus memiliki kemampuan untuk menyerap sifat-sifat Tuhan dan mampu berakhlak sesuai dengan akhlak Tuhan.

Dengan kata lain, seorang khalifah harus memiliki kesadaran akan dunia, kemampuan untuk berkarya, dan keberanian untuk memilih. Oleh karena itu, siapa pun yang memenuhi kriteria tersebut dapat dipilih sebagai pemimpin awal.

SIMPULAN

Pemikiran politik Islam yang diusung oleh Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan Ali Syariati menunjukkan upaya mereka dalam menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama untuk membangun tatanan sosial dan politik yang lebih adil. Hasan Al-Banna melalui Ikhwanul Muslimin menekankan pentingnya keterlibatan Islam dalam politik sebagai tanggung jawab negara untuk menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Ia melihat bahwa pemerintahan adalah alat untuk menerapkan syariat dan menegakkan nilai-nilai kebenaran, kebebasan, dan keadilan, sehingga umat Islam dapat hidup sesuai dengan ajaran Islam yang menyeluruh.

¹⁰Nugroho, A, *Potret Islam Revolusioner dalam Pemikiran Ali Syari'ati*. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol 14 No. 1, (2014)

¹¹Marhaeni Saleh M, *Ali Syari'ati; Pemikiran Dan Gagasannya*, Jurnal Aqidah, Vol IV No. 2, (2018). hal. 186

Sayyid Qutb mengembangkan pemikiran politik Islam lebih jauh melalui konsep hakimiyah, yang menegaskan bahwa hanya hukum Allah yang memiliki legitimasi penuh dalam mengatur kehidupan manusia. Kritiknya terhadap sistem sekuler dan gagasannya tentang takfir menjadikan pemikiran Qutb sebagai inspirasi bagi banyak kelompok Islamis, meskipun juga memunculkan kontroversi karena beberapa kelompok mengadopsi ide-idenya untuk membenarkan tindakan ekstremisme. Pemikiran Qutb menekankan perlunya umat Islam untuk kembali kepada syariat sebagai solusi atas problematika sosial, ekonomi, dan politik.

Ali Syariati, dengan pendekatan revolusionernya, menawarkan Islam sebagai ideologi progresif yang relevan untuk melawan penindasan dan ketidakadilan sosial. Konsep *Tauhid* yang ia gagas menjadi simbol persatuan dan perlawanan terhadap tirani, sementara kritiknya terhadap ulama tradisional menunjukkan pandangannya bahwa Islam harus mampu beradaptasi dengan tantangan modernitas. Melalui tulisan dan ceramahnya, ia menginspirasi gerakan intelektual yang mendorong perubahan sosial-politik di Iran. Dengan demikian, ketiga tokoh ini, meskipun berasal dari konteks yang berbeda, memiliki kesamaan visi untuk menjadikan Islam sebagai sumber etika politik yang adil, transparan, dan akuntabel.

REFERENSI

- Afifah, N., Lestari, J. T., & Annarawati, R. 2022. *Pemikiran/Pembaharuan Islam Iran: Ali Syariati*. TABYIN: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM. 4 (01), 58
- Andri, Alsar & Askarmin Harun. 2019. *Kekuasaan Dalam Pandangan Negara Konvensional dan Negara, Jurnal Dialektika*. 4 (1), 42
- Hasanuddin, M. Iqbal. 2019. *Studi Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Negara Islam, Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*. 9 (1), 16
- M, Marhaeni Saleh. 2018. *Ali Syari'ati; Pemikiran Dan Gagasannya, Jurnal Aqidah*. IV (2), 186
- Nafis, Moh. Muhyar dan Delta Yaumin Nahri. 2023. *KONSEP TAKFİR SAYYID QUṬB DALAM SURAH ALMĀ'IDAH (Analisis Maqāṣid Al-Qur'ān Perspektif Aḥmad al-Raysūnī)*, AT-TIBYAN: Journal Of Qur'an and Hadis Studies. 6 (1), 26
- Nugroho, A, 2014. *Potret Islam Revolusioner dalam Pemikiran Ali Syari'ati*. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum. 14 (1)
- Otoman. 2015. *PEMIKIRAN POLITIK HASAN AL-BANNA (1906-1949) DAN PEMBENTUKAN RADIKALISME ISLAM, Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*. XV (1), 49
- Sani, Azwar. 2023. *Radikalisme dan Ekstremisme dalam Pemikiran Sayyid Qutb: Tinjauan Kritis atas Tafsir Fi-Zilalil Qur'an, Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir*. 4 (2), 46.
- Syari'ati, Ali. 1992. *Islam Mahzab Pemikiran dan Aksi*. Bandung: Mizan
- Umam, Saifir. 2004. *Sayyid Qutb: Pemikiran dan Pengaruhnya terhadap Gerakan-Gerakan Islam Radikal di Mesir, Tsaqafah*. 2 (2), 63
- Ummah, Siti Syamsiyatul. 2020. *Teologi Pembebasan Ali Syari'ati (Kajian Humanisme dalam Islam), Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*. 2 (2), 181
- Qutb, Sayyid. 1996. *Fi Zhilal al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Shuruq